

## Analisis Realisasi Pendapatan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara

Margaret Simangunsong<sup>1\*</sup>, Zamzami<sup>2</sup>, Parmadi<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [thecermargarets@gmail.com](mailto:thecermargarets@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** This study aims to: 1) identify and analyze the degree of fiscal decentralization and the level of financial independence of regencies and cities in North Sumatra Province during the period 2015–2024; and 2) analyze the variation in regional revenue realization based on its components, as well as the variation in regional financial capacity across regencies/cities during the same period. The methods used in this research include the Fiscal Decentralization Degree Ratio (DDF), the Regional Financial Independence Ratio (RKKD), and a Two-Way ANOVA test, supported by SPSS 20 software. The findings show that the degree of fiscal decentralization remains relatively low from year to year, indicating a strong dependence on central government transfers. Similarly, the regional financial independence ratio is also categorized as low, with an instructive pattern of relationship, meaning that regional governments still have limited ability to finance development needs independently. The Two-Way ANOVA test results reveal significant differences in regional revenue realization both across regencies/cities and across years within the study period. The largest variations are attributed to the differing characteristics of each regency/city, including economic potential, effectiveness in managing locally generated revenue, and variations in regional fiscal structures. These findings highlight the importance of enhancing fiscal capacity and optimizing local revenue sources throughout North Sumatra.

**Keywords:** ANOVA Test; Degree of Fiscal Decentralization; Financial Capacity Variation; Regional Financial Independence; Revenue Realization.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal serta tingkat kemandirian keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015–2024; dan 2) Menganalisis variasi realisasi pendapatan daerah berdasarkan komponennya serta variasi kemampuan keuangan daerah pada setiap kabupaten/kota dalam periode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), serta Uji Anova Dua Arah dengan bantuan perangkat lunak SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara masih cenderung rendah dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Demikian pula, rasio kemandirian keuangan daerah juga berada pada kategori rendah dengan pola hubungan yang bersifat instruktif, artinya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan masih terbatas dan belum sepenuhnya mandiri. Melalui uji Anova Dua Arah, ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam realisasi pendapatan daerah, baik antar kabupaten/kota maupun antar tahun selama periode pengamatan. Variasi perbedaan yang paling besar dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing kabupaten/kota, termasuk potensi ekonomi, efektivitas pengelolaan PAD, serta struktur fiskal daerah yang berbeda-beda. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan kapasitas fiskal dan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Derajat Desentralisasi Fiskal; Kemandirian Keuangan Daerah; Realisasi Pendapatan; Uji Anova; Variasi Kemampuan Keuangan.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sejak tahun 1974 melalui UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang “Pokok-pokok pemerintahan di daerah”. Dalam Achmad & Zubakhrum (2024) menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah mendapat wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri. Dalam penerapan otonomi daerah terdapat tiga prinsip yang di terapkan yaitu prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan yang terakhir adalah tugas

perbantuan. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada penlitian ini, penulis akan berfokus pada desentralisasi fiskal. Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah pemerataan pendapatan antar daerah otonom sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Penerapan desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Adapun Struktur dari APBD adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum dan komponen terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Penerapan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan bahwa pemberian wewenang pada pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Oleh sebab itu dengan penerapan otonomi fiskal , masing-masing daerah menjadi lebih tau apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi daerahnya. Penerapan desentralisasi fiskal maupun otonomi fiskal diharapkan mampu mendorong setiap daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemandirian ini bertujuan agar setiap daerah mampu mengoptimalkan pembiayaan pembangunan dan layanan public dengan memanfaatkan potensi sumber lokal yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila PAD semakin tinggi, dapat di artikan bahwa daerah tersebut telah mandiri secara fiskal atau dapat di artikan bahwa daerah tersebut dapat melakukan pembiayaan dan pembangunan daerah dengan mandiri tanpa dominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Pada realita yang terjadi, banyak daerah yang masih tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BPS diperoleh bahwa Provinsi yang berada di Pulau Jawa cenderung memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Setelah Pulau Jawa, Pulau Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang tinggi.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 8 Kota dan 25 Kabupaten dimana dalam 3 tahun terakhir hanya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang memiliki realisasi anggaran yang paling tinggi sementara daerah lain memiliki realisasi penerimaan yang rendah. Pada realisasi penerimaan tersebut, komponen dana transfer lebih besar dibandingkan dengan komponen PAD serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dapat di artikan bahwa terjadi kesenjangan pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Karena kesenjangan tersebut, penulis hendak melakukan penelitian yang menganalisis Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis derajat desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara serta Untuk mengalisis bagaimana variasi realisasi pendapatan daerah berdasarkan komponennya dan variasi kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2015-2024.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Otonomi Daerah**

Menurut UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah otonom memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola kepentingan lokalnya dalam naungan NKRI. Secara singkat penerapan otonomi daerah diterapkan agar setiap daerah otonom dapat mengelola sumberdayanya sendiri. Dengan penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong tiap wilayah agar aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing (Sinaga, 2010).

### **Konsep Keuangan Daerah**

Keuangan daerah mencakup seluruh hak serta kewajiban yang diukur dalam bentuk uang serta aset yang dianggap sebagai kekayaan daerah (Oktavianus et al., 2015). Hak dalam keuangan daerah merupakan hak dalam memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hak dalam menerima sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan. Keuangan daerah dibedakan menjadi dua jenis pengelolaan dimana keuangan yang dikelola secara langsung dan dipisahkan. Kekayaan yang dikelola secara langsung meliputi APBD serta aset inventaris daerah sementara keuangan yang dikelola secara terpisah adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah (Halim, 2007).

### **Konsep Desentralisasi Fiskal**

Menurut buku administrasi pemerintahan daerah oleh Achmad & Zubakhrum (2024) desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan pengeluaran daerahnya sendiri. Fokus dari desentralisasi berada pada tingkat kabupaten dan kota. Kondisi keuangan di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda serta pengelolaan yang berbeda juga (Runjung et al., 2022). Tujuan utama dari penerapan desentralisasi fiskal adalah untuk pemerataan keuangan daerah antar otonom.

Kemudian tujuan lain dari pemberian wewenang tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Puspita et al., 2021).

### **Konsep Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi merupakan nilai dari hasil perhitungan nilai PAD dibagi dengan total pendapatan. Jika derajat desentralisasinya semakin tinggi maka menunjukkan bahwa semakin besar pula porsi belanja daerah yang di biayai oleh penerimaan asli daerah (Halim, 2007). Perbedaan antara desentralisasi fiskal dengan otonomi fiskal terletak dalam fokus dan fungsinya. Dalam derajat desentralisasi fiskal yang menjadi fokusnya adalah pada besar kecilnya proporsi PAD terhadap pendapatan total daerah sementara pada derajat otonomi fiskal yang menjadi fokusnya adalah untuk melihat seberapa besar tingkat kewenangan serta keleluasaan pengelolaan keuangan.

### **Konsep Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan daerah dalam membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah, pembangunan dan pendalaman masyarakat di daerahnya secara mandiri melalui penerimaan asli daerah yang dimiliki tanpa ketergantungan terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat (Aneta dkk., 2025). Sederhananya dapat dijelaskan bahwa Rasio ini mengukur kapasitas pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah daerah serta pelayanan masyarakat (Ambya, 2023). Kemandirian fiskal dan derajat desentralisasi adalah dua hal yang saling berhubungan karena tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai kemandirian fiskal.

### **Konsep Pendapatan Daerah**

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004, seluruh dana yang masuk ke rekening kas umum daerah adalah pendapatan daerah yang kemudian akan meningkatkan ekuitas lancar yang dimiliki otoritas daerah. Adapun penetapan pendapatan daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta kemampuan pendapatan daerahnya (Elsye, 2020). Dengan pendapatan yang memadai, pemerintah tentu dapat memberikan layanan yang optimal seperti dibidang infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan suatu daerah yang berasal dari berbagai sumber yang berada di wilayahnya dan di kelola langsung oleh pemerintah daerahnya. PAD ini merupakan salah satu dari bentuk dilaksanakannya desentralisasi fiskal dan merupakan pendapatan utama yang digunakan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan layanan

masyarakat yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan jumlah PAD yang cukup menjadikan pemerintah lebih leluasa dalam mengelola dan membiayai pembangunan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

### ***Pendapatan Transfer***

Dana transfer atau dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke wilayah untuk dialokasikan langsung oleh pemerintah daerah untuk pemerataan keuangan. Berdasarkan buku Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal, sumber utama pada pendapatan daerah selama duapuluh tahun yaitu sejak tahun 2001 – 2020 bersumber dari dana transfer dari APBN yang mencapai 66,81% (Puspita dkk., 2021). Dana Transfer terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY dan terakhir dana desa.

### ***Lain-lain Pendapatan yang Sah***

Menurut UU No.23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, LLPS mencakup seluruh pendapatan daerah kecuali PAD dan dana transfer. Dalam UU No 33 Tahun 2004 Bab VII Pasal 43 menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang meliputi hibah serta pendapatan dana darurat.

## **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang memadukan data *Cross-section* dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan data *Time-Series* dengan rentang waktu dari tahun 2010-2024. Data yang digunakan diperoleh dari portal Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk memaparkan kondisi yang diteliti dengan menyajikan data dalam bentuk angka. Analisis dalam penelitian ini menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan analisis variasi (*Anova*) dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Model analisis yang digunakan di formulasikan sebagai berikut:

## Rasio Derajat Desentralisasi

$$DDF_t = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\% \quad \dots \quad (1)$$

Dimana :

$DDF_t$  = Derajat desentralisasi fiskal pada tahun tertentu

$PAD_t$  = Pendapatan asli daerah pada tahun tertentu

$TPD_t$  = Total pendapatan daerah pada tahun tertentu

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

Dimana :

RKKD = Rasio kemandirian keuangan daerah

**PAD** = Pendapatan asli daerah

## **Variasi Realisasi dan Kemampuan Pendapatan Daerah Berdasarkan Komponennya Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Selama Periode Tahun 2015 - 2024**

**Tabel 1.** Variasi Realisasi dan Kemampuan Pendapatan Daerah Berdasarkan Komponennya

Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Selama Periode Tahun 2015 - 2024

Source of Variation	Sum of Squares	DF	Mean Square	$F_0/F_{hitung}$
Daerah	$SS_D$	$i - 1$	$MS_D = \frac{SS_D}{i - 1}$	$F_1 = \frac{MS_D}{MS_E}$
Tahun	$SS_T$	$j - 1$	$MS_T = \frac{SS_T}{j - 1}$	$F_2 = \frac{MS_T}{MS_E}$
Error	$SS_E$	$(j-1)(i-1)$	$MS_E = \frac{SS_E}{(i - 1)(j - 1)}$	
Total	$SS_T$	N		

Sumber : Wijaya, Indriyati, Rinawati, et al., (2024)

Dimana :

$SS_D$  = Rata-rata total baris tiap daerah

$SS_T$  = Rata-rata total kolom tiap tahun

$SS_E$  = Rata-rata total daerah dan tahun

$MS_D$  = Nilai rata-rata daerah

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Rasio Derajat Desentralisasi**

Data pada Tabel 2 menunjukkan derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 – 2024. Berdasarkan derajat desentralisasi sepuluh tahun terakhir juga dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun ketahunnya, bahkan cenderung stagnan. Nilai derajat desentralisasi yang rendah menjelaskan bahwa PAD daerahnya belum dapat di optimalkan dan menjadi sumber utama dalam pembangunan daerah. Sehingga sumber utama dari pendapatan daerahnya berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang sangat tinggi. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 24 diantaranya berada pada posisi Sangat kurang, yaitu dimana nilai derajat desentralisasinya kurang dari 10%. Sementara daerah yang memiliki potensi ekonomi yang kuat hanya Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Dengan tingginya aktivitas ekonomi seperti bisnis dan usaha lain akan mendorong basis pajak, retribusi yang luas dan beragam, seperti pajak hotel, PBB, dan pajak iklan dimana keadaan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

**Tabel 2.** Rasio Derajat Desentralisasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara  
dalam periode 2015-2024

<i>Kab/Kota</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Rata-Rata</i>	<i>Kriteria</i>
<i>Kab. Asahan</i>	6.985	3.371	8.313	8.848	8.679	9.788	8.200	9.401	9.402	10.433	8.342	Sangat Kurang
<i>Kab. Dairi</i>	6.609	6.399	11.333	6.838	6.369	8.509	6.334	7.314	6.927	9.409	7.604	Sangat Kurang
<i>Kab. Deli Serdang</i>	18.521	18.411	25.489	21.694	23.100	24.277	26.167	27.919	26.771	27.005	23.936	Sedang
<i>Kab. Karo</i>	5.960	6.860	11.416	10.647	8.264	7.913	7.999	7.464	7.340	8.434	8.230	Sangat Kurang
<i>Kab. Labuhanbatu</i>	9.972	9.859	10.708	13.331	13.296	13.712	17.748	14.738	14.675	16.664	13.470	Kurang
<i>Kab. Langkat</i>	6.067	5.989	6.045	6.138	7.094	7.954	6.992	6.353	10.624	8.355	7.161	Sangat Kurang
<i>Kab. Mandailing Natal</i>	5.254	4.941	5.273	5.568	5.862	6.003	8.379	5.919	7.404	7.730	6.233	Sangat Kurang
<i>Kab. Nias</i>	10.259	10.121	10.992	9.841	11.161	11.634	11.748	10.317	12.029	13.325	11.143	Kurang
<i>Kab. Simalungun</i>	5.795	5.975	10.972	7.483	8.152	7.323	7.963	6.877	7.155	9.546	7.724	Sangat Kurang
<i>Kab. Tapanuli Selatan</i>	10.045	6.343	8.398	10.230	11.386	10.129	8.858	8.308	10.720	9.544	9.396	Sangat Kurang
<i>Kab. Tapanuli Tengah</i>	6.637	6.712	6.646	6.300	7.332	7.377	7.274	6.424	5.833	8.630	6.916	Sangat Kurang
<i>Kab. Tapanuli Utara</i>	7.407	7.912	13.303	8.187	8.551	10.333	11.480	11.111	9.830	10.231	9.834	Sangat Kurang
<i>Kab. Toba Samosir</i>	3.596	5.552	4.796	5.257	6.329	5.704	6.984	7.178	8.001	7.908	6.131	Sangat Kurang
<i>Kota Binjai</i>	9.284	10.091	15.829	15.077	12.352	12.733	10.586	12.055	12.229	13.498	12.373	Kurang
<i>Kota Medan</i>	34.978	35.638	39.459	38.466	33.154	36.624	37.955	40.932	41.571	45.503	38.428	Cukup
<i>Kota Pematangsiantar</i>	10.720	9.381	12.121	14.000	12.439	15.732	15.349	16.411	14.487	17.560	13.820	Kurang
<i>Kota Sibolga</i>	9.919	10.994	16.833	2.992	11.354	12.885	12.933	13.263	13.998	14.375	11.955	Kurang
<i>Kota Tanjung Balai</i>	9.955	9.814	10.764	11.713	9.838	10.411	9.669	8.751	10.929	13.312	10.516	Kurang
<i>Kota Tebing Tinggi</i>	12.354	13.286	15.910	15.889	14.754	13.792	11.978	13.376	14.600	15.235	14.117	Kurang
<i>Kota Padang Sidempuan</i>	8.769	9.596	12.282	9.282	9.874	8.373	7.682	8.080	8.334	10.349	9.262	Sangat Kurang
<i>Kab. Pakpak Bharat</i>	3.357	3.654	5.719	3.747	5.738	4.439	4.621	3.411	3.531	5.321	4.354	Sangat Kurang
<i>Kab. Nias Selatan</i>	1.846	1.612	1.638	1.683	1.957	1.137	2.342	2.163	1.671	3.037	1.909	Sangat Kurang
<i>Kab. Humbang Hasundutan</i>	4.551	4.720	9.004	10.103	7.317	7.232	3.108	6.930	6.626	7.945	6.754	Sangat Kurang
<i>Kab. Serdang Bedagai</i>	6.314	7.539	7.478	12.443	9.095	8.020	8.540	7.614	8.724	10.520	8.629	Sangat Kurang
<i>Kab. Samosir</i>	5.055	5.041	8.768	5.911	6.835	7.560	7.255	7.804	7.652	10.585	7.247	Sangat Kurang
<i>Kab. Batu Bara</i>	5.606	5.436	6.294	6.114	10.834	14.073	14.936	10.240	10.932	15.427	9.989	Sangat Kurang
<i>Kab. Padang Lawas</i>	4.837	3.944	4.543	4.610	4.590	4.250	4.389	4.529	4.205	4.732	4.463	Sangat Kurang
<i>Kab. Padang Lawas Utara</i>	3.607	2.901	7.009	17.009	3.583	4.627	3.769	3.909	3.968	4.842	5.523	Sangat Kurang
<i>Kab. Labuhanbatu Selatan</i>	4.425	4.813	9.775	5.876	7.789	6.482	6.733	5.782	6.110	7.608	6.539	Sangat Kurang
<i>Kab. Labuhanbatu Utara</i>	4.036	4.316	5.017	5.517	6.478	5.731	5.666	5.155	5.132	6.743	5.379	Sangat Kurang
<i>Kab. Nias Utara</i>	2.822	3.511	2.909	6.712	6.554	7.604	2.713	1.631	1.828	2.744	3.903	Sangat Kurang
<i>Kab. Nias Barat</i>	3.110	2.921	5.617	5.613	2.469	3.018	2.856	1.755	1.960	2.514	3.183	Sangat Kurang
<i>Kota Gunungsitoli</i>	3.907	4.133	4.306	4.192	4.408	3.628	3.021	3.551	3.341	4.859	3.934	Sangat Kurang

Sumber : DJPK, 2025 (data diolah)

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada Tabel 3. Menjelaskan hasil dari rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Kemandirian fiskal berbeda dengan derajat desentralisasi fiskal. Pada desentralisasi fiskal berfokus pada bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah pada total pendapatan daerah. Sementara pada rasio kemandirian keuangan daerah berfokus pada bagaimana pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya tanpa berfokus pada transfer pemerintah pusat.

Pada Tabel 3 dapat dilihat dan diketahui bahwa rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki rasio desentralisasi fiskal yang sangat kurang. Dengan kriteria sangat kurang tersebut menggambarkan hubungan dengan pemerintah pusat yang instruktif. Artinya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan masih sangat terbatas dan cenderung hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar anggaran daerahnya berasal dari dana transfer baik itu DAU, DAK maupun DBH.

Kabupaten Nias Barat menduduki posisi yang sangat rendah pada rasio kemandirian keuangan daerah. derajat desentralisasinya cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Sementara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masih menempati posisi paling tinggi diantara ke-33 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan memiliki kriteria tinggi dengan nilai 89,42% dan Kabupaten Deli Serdang berada pada kriteria rendah dengan tingkat perentase sebesar 37,67%. Pada kriteria rendah memiliki pola hubungan yang konsultatif dengan pemerintah pusat. Dapat diartikan dengan meskipun Kabupaten Deli Serdang masih bergantung pada dana transfer, namun pemerintah daerah memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai penggunaan dana transfer. Deli Serdang dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan spesifik daerahnya, namun pemerintah daerah belum memiliki kekuatan penuh dalam menentukan arah kebijakan fiskal tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Sementara untuk Kota Medan yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang paling tinggi memiliki pola hubungan yang partisipatif dengan pemerintah pusat. Artinya, Kota Medan telah mandiri secara finansial dan pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangannya pada pemerintah Kota Medan. Dengan demikian Kota Medan dapat memiliki kekuasaan penuh dalam membiayai pengeluaran daerahnya melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Medan.

**Tabel 3.** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015 – 2024

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata	Kriteria
Kab. Asahan	10.184	3.893	10.876	10.970	11.046	12.472	10.350	11.446	11.406	12.594	10.524	Sangat Kurang
Kab. Dairi	9.328	7.314	15.270	7.996	7.627	10.256	7.478	8.321	7.809	10.759	9.216	Sangat Kurang
Kab. Deli Serdang	32.920	25.504	42.730	32.228	35.774	42.740	41.527	42.922	40.170	40.185	37.670	Rendah
Kab. Karo	10.310	9.606	17.759	16.912	10.020	9.338	9.657	9.298	8.558	9.693	11.115	Sangat Kurang
Kab. Labuhanbatu	14.283	12.524	13.721	17.525	18.953	20.102	24.968	19.268	19.213	21.286	18.184	Sangat Kurang
Kab. Langkat	8.825	7.657	7.874	7.933	8.644	9.598	8.380	7.305	12.918	9.527	8.866	Sangat Kurang
Kab. Mandailing Natal	7.452	6.668	7.707	7.968	8.668	9.161	10.083	6.705	8.470	8.718	8.160	Sangat Kurang
Kab. Nias	13.482	11.584	13.163	11.733	13.423	18.800	14.382	11.946	14.201	15.656	13.837	Sangat Kurang
Kab. Simalungun	8.969	7.210	15.295	10.287	9.933	8.830	9.695	7.850	8.449	11.006	9.752	Sangat Kurang
Kab. Tapanuli Selatan	14.587	7.142	11.850	12.813	14.343	12.519	10.657	10.044	13.148	11.191	11.829	Sangat Kurang
Kab. Tapanuli Tengah	8.663	7.508	7.473	7.604	8.805	8.753	8.691	7.373	6.584	9.884	8.134	Sangat Kurang
Kab. Tapanuli Utara	10.860	9.099	15.979	9.908	10.535	12.900	14.417	13.342	11.637	11.900	12.058	Sangat Kurang
Kab. Toba Samosir	5.145	7.420	6.614	5.969	7.380	6.571	8.169	8.224	9.291	9.251	7.403	Sangat Kurang
Kota Binjai	12.965	13.015	20.193	18.565	15.086	16.862	13.192	15.031	15.380	16.753	15.704	Sangat Kurang
Kota Medan	109.891	68.614	81.957	75.849	84.832	73.107	92.550	106.594	96.605	104.224	89.422	Tinggi
Kota Pematangsiantar	15.683	13.422	14.485	17.200	15.464	19.664	19.952	21.591	18.704	22.757	17.892	Sangat Kurang
Kota Sibolga	12.472	12.801	20.922	3.256	13.796	15.682	15.913	16.253	17.612	17.641	14.635	Sangat Kurang
Kota Tanjung Balai	12.963	11.746	12.735	14.184	11.639	12.631	11.714	10.722	13.242	16.290	12.787	Sangat Kurang
Kota Tebing Tinggi	17.816	16.857	19.971	21.085	19.229	17.703	15.334	18.160	19.296	19.069	18.452	Sangat Kurang
Kota Padang Sidempuan	12.348	11.302	15.489	11.119	11.922	9.927	9.031	9.733	9.974	12.075	11.292	Sangat Kurang
Kab. Pakpak Bharat	3.780	3.928	6.229	4.089	7.164	5.489	5.150	3.730	3.831	5.804	4.919	Sangat Kurang
Kab. Nias Selatan	2.391	1.707	1.714	1.870	2.193	1.247	2.614	2.308	1.773	3.194	2.101	Sangat Kurang
Kab. Humbang Hasundutan	5.938	5.830	11.890	13.602	10.237	10.147	3.339	8.078	7.653	8.971	8.569	Sangat Kurang
Kab. Serdang Bedagai	9.241	8.806	8.585	15.184	13.288	11.498	10.422	8.914	10.238	12.651	10.883	Sangat Kurang
Kab. Samosir	6.573	6.263	11.393	7.802	8.023	8.816	8.366	9.013	8.781	12.220	8.725	Sangat Kurang
Kab. Batu Bara	7.739	6.225	7.476	7.242	14.059	18.288	19.782	12.548	13.566	19.365	12.629	Sangat Kurang
Kab. Padang Lawas	6.673	4.394	6.680	6.720	6.852	6.452	4.979	4.990	4.686	5.220	5.765	Sangat Kurang
Kab. Padang Lawas Utara	5.241	4.133	10.506	10.605	5.524	7.400	4.269	4.295	4.346	5.264	6.158	Sangat Kurang
Kab. Labuhanbatu Selatan	5.681	5.533	11.503	6.871	9.758	7.796	8.036	6.744	7.204	8.719	7.784	Sangat Kurang
Kab. Labuhanbatu Utara	5.413	4.888	6.277	6.117	7.825	6.803	6.628	5.862	5.815	7.609	6.324	Sangat Kurang

Kab. Nias Utara	3.331	4.271	3.619	8.924	7.316	8.483	3.014	1.766	1.991	2.985	4.570	Sangat Kurang
Kab. Nias Barat	3.788	3.136	6.137	6.080	2.713	3.325	3.152	1.852	2.074	2.615	3.487	Sangat Kurang
Kota Gunungsitoli	4.947	4.523	5.444	4.691	5.001	4.699	3.398	3.940	3.672	5.276	4.559	Sangat Kurang

Sumber : DJPK, 2025 (data diolah)

### Analisis Variasi Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Komponennya Pada Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**Tabel 4.** Hasil Analisis Variasi PAD berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun Periode 2015

– 2024

<b>Dependent Variable: PAD</b>						
<b>Source</b>	Type III Sum of Squares	<b>df</b>	Mean Square	<b>F</b>	<b>Sig.</b>	Partial Eta Squared
<b>Corrected Model</b>	37381068.817 <sup>a</sup>	41	911733.386	133.319	.000	.950
<b>Intercept</b>	8947051.384	1	8947051.384	1308.289	.000	.820
<b>Daerah</b>	37101361.420	32	1159417.544	169.537	.000	.950
<b>Tahun</b>	279707.397	9	31078.600	4.544	.000	.124
<b>Error</b>	1969557.442	288	6838.741			
<b>Total</b>	48297677.643	330				
<b>Corrected Total</b>	39350626.259	329				

a. R Squared = .950 (Adjusted R Squared = .943)

Sumber : DJPK, 2025 (diolah)

Melalui hasil olah data yang telah dilakukan pada komponen PAD maka akan dilakukan uji Hipotesis

- Pada faktor daerah, diperoleh nilai *Sig.* sebesar .000 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai  $\alpha$  yaitu 0.05. Dalam skema pengambilan keputusan, apabila nilai *Sig* <  $\alpha$  maka akan menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dapat diartikan bahwa pada  $H'$  menolak  $H'_0$  dan menyetujui  $H'_1$  dimana  $H_1$  menyatakan bahwa terdapat perbedaan realisasi pendapatan asli daerah di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
- Pada faktor tahun, diperoleh nilai *Sig.* sebesar .000 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai  $\alpha$  yaitu 0.05. Dalam skema pengambilan keputusan, apabila nilai *Sig* <  $\alpha$  maka akan menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dimana  $H''_1$  menyatakan bahwa terjadi realisasi pendapatan asli daerah di setiap tahunnya yaitu sejak tahun 2015 – 2024.

Berdasarkan nilai *Sign* yang diperoleh dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah memiliki perbedaan di setiap daerah dan di setiap tahunnya. Nilai *Sum of Square* dari faktor daerah sebesar 37.101.261,420 miliar dan Nilai *Sum of Square* dari faktor tahun sebesar 279.702,397 miliar maka dapat dikatakan bahwa *SS Daerah > SS Tahun* yang diartikan dengan variasi realisasi pendapatan asli daerah yang terjadi lebih besar di daerah yakni pada kabupaten/kota dibandingkan dengan tahun observasi.

Pada tabel *Mean Square* dijelaskan mengenai rata-rata variasi yang terjadi di setiap faktornya *MS* di daerah sebesar 1.159.417,544 miliar sementara pada faktor tahun sebesar 31.078,600 miliar. Berdasarkan nilai tersebut, variasi yang terjadi berdasarkan daerah lebih besar dibandingkan variasi yang terjadi di setiap tahun.

Selanjutnya *Partial Eta Squared*, dimana nilai *Partial Eta Squared* pada faktor daerah sebesar 0,950 atau 95%. Artinya 95% dari total variasi PAD di sebabkan oleh perbedaan penerimaan PAD antar daerah. sementara pada faktor tahun, nilai *Partial Eta Squared* sebesar 0.124 atau 12,4% yang artinya 12,4% dari total variasi PAD disebabkan karena perbedaan tahun ketahun. Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan perbedaan daerah yaitu kabupaten dan kota sangat signifikan dalam menjelaskan terjadinya perbedaan Variasi pada PAD.

### **Dana Transfer**

**Tabel 5.** Hasil Analisis Variasi PAD berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun Periode 2015 – 2024

<b>Dependent Variable: Dana_Transfer</b>						
<b>Source</b>	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
<b>Corrected Model</b>	66836106.395 <sup>a</sup>	41	1630148.936	139.712	.000	.952
<b>Intercept</b>	310027018.98 0	1	310027018.98 0	26570.836	.000	.989
<b>Daerah</b>	62968690.868	32	1967771.590	168.648	.000	.949
<b>Tahun</b>	3867415.526	9	429712.836	36.828	.000	.535
<b>Error</b>	3360367.852	288	11667.944			
<b>Total</b>	380223493.22 7	330				
<b>Corrected Total</b>	70196474.246	329				

a. R Squared = .952 (Adjusted R Squared = .945)

Sumber : DJPK, 2025 (data diolah)

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, maka skematika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan adalah

- a) Pada faktor daerah diperoleh nilai  $Sig$  0,000 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Maka apabila nilai  $Sig < \alpha$  menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dimana  $H'_1$  menyatakan bahwa ada perbedaan variasi dalam realisasi Dana Transfer di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- b) Pada faktor tahun diperoleh nilai  $Sig$  0,000 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Maka apabila nilai  $Sig < \alpha$  menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dimana  $H''_1$  menyatakan bahwa ada perbedaan variasi dalam realisasi Dana Transfer daerah berdasarkan tahun di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh terdapat perbedaan variasi dalam realisasi dana transfer berdasarkan kabupaten/kota dan berdasarkan tahun.

Berdasarkan nilai *Sum of Squares*-nya faktor daerah memiliki nilai sebesar 62.986.690, 868 miliar dan nilai *SS* dari faktor tahun sebesar 3.867.415,526. Dapat diartikan bahwa perbedaan variasi terbesar terjadi pada faktor kabupaten/kota. Sementara tahun memiliki variasi namun cenderung lebih kecil.

Kemudian pada *Mean Square* menjelaskan variasi dana transfer yang terjadi menurut faktor daerah maupun faktor tahun. *MS* pada faktor daerah sebesar 1.967.771,590 yang artinya di setiap daerah memiliki variasi dana transfer sebesar 1.967.771,590. Sementara untuk faktor tahun memiliki nilai *MS* sebesar 429.712,836 yang artinya perbedaan variasi dana transfer pertahunnya sebesar 429.712,836.

Kemudian untuk *Partial Eta Squared* digunakan untuk melihat seberapa besar efek faktor daerah dan tahun dalam mempengaruhi variasi realisasi dana transfer. Untuk faktor daerah memiliki nilai sebesar 0,949 atau sebesar 94% yang artinya 94% variasi dana transfer disebabkan karena perbedaan antar daerah. sementara untuk faktor tahun memiliki nilai sebesar 0,535 atau 53% yang artinya 53% dari Variasi dana transfer disebabkan oleh perbedaan tahun. Namun perbedaan yang lebih besar disebabkan karena perbedaan daerah.

**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPS)**

**Tabel 6.** Hasil Analisis Variasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) berdasarkan Kabupaten/Kota dan Tahun Periode 2015 – 2024

<b>Dependent Variable: LLPS</b>						
Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
<b>Corrected Model</b>	8453697.222 <sup>a</sup>	41	206187.737	23.670	.000	.771
<b>Intercept</b>	7433804.609	1	7433804.609	853.386	.000	.748
<b>Daerah</b>	7673821.326	32	239806.916	27.529	.000	.754
<b>Tahun</b>	779875.897	9	86652.877	9.948	.000	.237
<b>Error</b>	2508753.265	288	8710.949			
<b>Total</b>	18396255.096	330				
<b>Corrected Total</b>	10962450.488	329				
<b>a. R Squared = .771 (Adjusted R Squared = .739)</b>						

Sumber : DJPK, 2025 (data diolah)

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa

- a) Pada faktor daerah diperoleh nilai *Sig* 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Maka apabila nilai *Sig*  $< \alpha$  menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dimana  $H'_1$  menyatakan bahwa ada perbedaan variasi dalam realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- b) Pada faktor tahun diperoleh nilai *Sig* 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Maka apabila nilai *Sig*  $< \alpha$  menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dimana  $H''_1$  menyatakan bahwa ada perbedaan variasi dalam realisasi Lain-lain pendapatan yang sah daerah berdasarkan tahun di Provinsi Sumatera Utara

Maka hipotesis yang dapat dijelaskan bahwa penerimaan realisasi Lain-lain pendapatan tang sah memiliki perbedaan di setiap daerah dan di setiap tahunnya. Selanjutnya adalah pada bagian *Sum of Square* yang merupakan kolom yang mengukur besarnya variasi yang terjadi pada setiap faktor. Pada faktor daerah, nilai SS-nya sebesar 7.673.821,326 dan pada faktor tahun nilai SS-nya sebesar 779.875,897. Dapat dijelaskan bahwa variasi penerimaan realisasi lain-lain pendapatan yang sah terbesar disebabkan karena perbedaan daerah

Kemudian untuk nilai *Mean Square* yaitu yang mengukur rata-rata variasi perfaktor yang dihitung dengan membagi nilai SS dengan jumlah *df*. Nilai *MS* daerah sebesar 239.806,916 dan nilai *MS* faktor tahun sebesar 86.652,877. Berdasarkan nilai *MS*-nya dapat dijelaskan bahwa rata-rata variasi antar daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan variasi antar tahun.

Terakhir adalah nilai pada *Partial Eta Squared*-nya, dimana nilai ini mengukur seberapa besar proporsi faktor tersebut dalam memberikan variasi pada realisasi LLPS. Pada daerah memiliki nilai *Partial Eta Squared* sebesar 0,754 atau sebesar 75,4% yang artinya bahwa sebesar 75,4% dari total variasi pada LLPS disebabkan oleh perbedaan antar daerah. sementara nilai *Partial Eta Squared* pada tahun sebesar 0,237 atau sebesar 23,7% yang artinya sebesar 23,7% perbedaan variasi dalam LLPS disebabkan karena perbedaan tahun.

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa daerah dan tahun sama-sama berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya variasi pada realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah di setiap kabupaten/kota. Namun faktor daerah merupakan faktor yang paling dominan atau faktor yang berkontribusi paling besar dalam menjelaskan perbedaan variasi realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang terjadi di setiap kabupaten/kota.

### **Variasi Kemampuan Keuangan Daerah pada Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara Selama Periode Tahun 2015-2024**

**Tabel 7.** Hasil Uji Anova Pada Variasi Kemampuan Keuangan Daerah di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015 – 2024

<b>Dependent Variable: DDF</b>					
<b>Source</b>	Type III Sum of Squares	<b>df</b>	Mean Square	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
<b>Corrected Model</b>	14607,013 <sup>a</sup>	41	356,269	106,610	,000
<b>Intercept</b>	28820,606	1	28820,606	8624,269	,000
<b>Daerah</b>	14291,069	32	446,596	133,639	,000
<b>Tahun</b>	315,943	9	35,105	10,505	,000
<b>Error</b>	962,439	288	3,342		
<b>Total</b>	44390,057	330			
<b>Corrected Total</b>	15569,452	329			

a. R Squared = .938 (Adjusted R Squared = .929)

Sumber : DJPK, 2025 (data diolah)

Data yang digunakan pada tabel 7 merupakan data dari Rasio derajat desentralisasi fiskal pada Tabel 2. Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh pada tabel 7, dapat dijelaskan bahwa:

- a). Variabel Daerah memiliki nilai F sebesar 8.624,269 dan dengan nilai *Sig.* sebesar ,000 dimana angka tersebut > 0,05 ( $\alpha$ ). Pada pengambilan keputusan, apabila nilai *Sig.* <  $\alpha$ , maka menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$ . Dapat diartikan bahwa pada  $H'$  menolak  $H_0$  dan menyetujui  $H_1$  dimana  $H_1$  menyatakan bahwa terdapat perbedaan Varias derajat desentralisasi fiskal di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

b). Pada variabel Tahun dijelaskan bahwa nilai F sebesar 133,639 dan dengan nilai *Sig.* sebesar ,000 dimana nilai ini  $< 0,05$  yang merupakan nilai  $\alpha$ . Apabila nilai *Sig.* ,000  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menyetujui  $H_1$ . Dimana  $H''_1$  menyatakan bahwa terdapat perbedaan variasi derajat desentralisasi fiskal dalam setiap tahunnya.

Kemudian pada nilai *Sum Of Squares* dari Variabel daerah memiliki nilai sebesar 14291,069 dan untuk nilai *Sum Of Squares* dari variabel tahun sebesar 315,943. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa *Sum of Squares* Daerah  $>$  nilai *Sum of Squares* Tahun. Nilai dari *Sum of Square* menjelaskan seberapa besar faktor tersebut dalam variasi keuangan daerah. Untuk itu berdasarkan nilai yang diperoleh diketahui bahwa nilai *Sum of Squares* Daerah  $>$  nilai *Sum of Squares* Tahun yang artinya variasi pada nilai rasio kemandirian keuangan paling besar disebabkan oleh perbedaan antar kabupaten dan kota. Namun pada tahun, tetapi terjadi variasi namun variasi yang terjadi pada faktor tahun tidak sebesar variasi yang terjadi antara kabupaten dengan kota.

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa kombinasi daerah dan tahun secara signifikan dalam mempengaruhi Variabel dependen DDF.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Derajat desentralisasi fiskal di setiap daerah masih cenderung rendah dari tahun ketahunnya. Hanya Kota Medan yang memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Sementara kabupaten kota yang berada di Pulau Nias memiliki desentralisasi yang sangat rendah. Sementara untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten/kota cenderung rendah dan memiliki pola hubungan yang instruktif. Artinya pemerintah daerah hanya menjalankan mandat yang diberikan dari pemerintah pusat. Hal tersebut karena PAD yang rendah dan di dominasi oleh Dana Transfer. Namun untuk Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, memiliki kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan uji *Anova dua arah* yang telah dilakukan diperoleh bahwa terdapat perbedaan realisasi pendapatan daerah di setiap kabupaten/kota dan disetiap tahunnya. Perbedaan variasi yang paling besar disebabkan karena perbedaan kabupaten/kota. Kemudian pada realisasi pendapatan yang diterima oleh setiap daerah, terjadi kesenjangan terkhususnya pada komponen Dana Transfer. Pada Komponen Dana transfer, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang memiliki realisasi dana transfer yang lebih tinggi. Sementara Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten yang berada di Pulau Nias cenderung lebih rendah.

## Saran

Dengan rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah harus melakukan ekstensifikasi basis PAD dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap termasuk aset daerah yang kurang produktif.

Untuk mengurangi kesenjangan penerimaan daerah yang terjadi, pemerintah daerah perlu dilakukan intensifikasi dimana mengoptimalkan penagihan dari sumber-sumber penerimaan yang sudah ada tanpa membuat jenis pajak atau jenis retribusi yang baru. Dimana akan lebih berfokus pada pembayaran pajak secara penuh, tepat waktu dan sesuai aturan. Hal ini perlu di fokuskan pada daerah-daerah yang memiliki realisasi penerimaan yang rendah. Serta dalam menyusun perencanaan anggaran Dana Transfer, pemerintah pusat perlu meninjau ulang serta memberikan bobot yang memadai untuk mencapai pemerataan layanan public dasar di daerah yang memiliki basis fiskal yang rendah seperti kabupaten di Pulau Nias dan Kabupaten Pakpak Bharat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., & Zubakhrum, M. B. (2024). *Administrasi pemerintahan daerah* (L. Dwi, Ed.). Askara Sastra Media.
- Achmad, M., & Zubakhrum, M. B. (2024). *Administrasi pemerintahan daerah* (L. Dwi, Ed.). Askara Sastra Media.
- Ambya. (2023). *Ekonomi keuangan daerah*. AURA.
- Ambya. (2023). *Ekonomi keuangan daerah*. AURA.
- Aneta, Y., Aneta, A., Tohopi, R., Ibrahim, D., Hulinggi, P. A., & Warsono, P. (2025). *Kemandirian fiskal daerah: Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai referensi*. Media Penerbit Indonesia.
- Aneta, Y., Aneta, A., Tohopi, R., Ibrahim, D., Hulinggi, P. A., & Warsono, P. (2025). *Kemandirian fiskal daerah: Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai referensi*. Media Penerbit Indonesia.
- DJPK. (2025). *Portal Data SIKD*. Kementerian Keuangan.
- DJPK. (2025). *Portal data SIKD*. Kementerian Keuangan.
- Elsye, R. (2020). *Alokasi keuangan daerah berdasarkan potensi daerah*. ALQAPRINT Jatinangor.
- Elsye, R. (2020). *Alokasi keuangan daerah berdasarkan potensi daerah*. ALQAPRINT Jatinangor.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-3). Salemba Empat.
- Oktavianus, D., Murni, S., & Saerang, I. S. (2015). Analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah pada Kota Bitung dan Kota Tomohon periode anggaran 2010–2014. *Jurnal EMBA*, 3(3), 927–938.
- Oktavianus, D., Murni, S., & Saerang, I. S. (2015). Analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah pada Kota Bitung dan Kota Tomohon periode anggaran 2010–2014. *Jurnal EMBA*, 3(3), 927–938.
- Puspita, D., Pahlevi, M., & Hadi, S. (2021). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia* (U. S. Hamidi & D. Puspita, Eds.). Badan Kebijakan Fiskal.
- Puspita, D., Pahlevi, M., & Hadi, S. (2021). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia* (U. S. Hamidi & D. Puspita, Eds.). Badan Kebijakan Fiskal.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Sinaga, H. O. (2010). *Otonomi daerah dan kebijakan publik*. Lepsindo.
- Sinaga, H. O. (2010). *Otonomi daerah dan kebijakan publik*. Lepsindo.
- Wijaya, E., Indriyati, R., Rinawati, & Utami, R. N. (2024). *Pengantar statistik: Analisis varians (ANOVA)* (Efitra, Ed.; Edisi pertama). Sonpedia.
- Wijaya, E., Indriyati, R., Rinawati, & Utami, R. N. (2024). *Pengantar statistik: Analisis varians (ANOVA)* (Efitra, Ed.; Edisi pertama). Sonpedia.